

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
PUSAT DAN DAERAH  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



**Disusun oleh:**

**F. Antonius Tuli Marang  
NIM : 992114121  
NIRM : 990051121303120121**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2004**

Skripsi

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
PUSAT DAN DAERAH**

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Oleh:

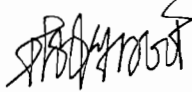
F. Antonius Tuli Marang

NIM : 992114121

NIRM : 990051121303120121

Telah disetujui oleh:

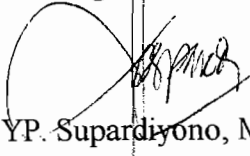
Pembimbing I



Lilis Setiawati, S.E., M.Si., Ak

Tanggal: 28-10-2003

Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak

Tanggal: 12-11-2003

Skripsi

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

**PUSAT DAN DAERAH**

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

F. Antonius Tuli Marang

NIM : 992114121


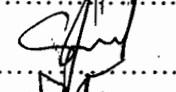
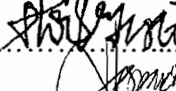

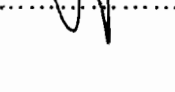
NIRM : 990051121303120121

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 27 Maret 2004

dan dinyatakan memenuhi syarat


**Susunan Panitia Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak.	
Sekretaris	Drs. Anto Listianto, MSA., Ak	
Anggota	Lilis Setiawati, S.E., M.Si, Ak	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak	
Anggota	Drs. Rubiyatno, M.M.	

Yogyakarta, 31 Maret 2004

Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan



  
Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### ***Motto:***

- *Setiap orang punya bakat. Yang langkah adalah keberanian untuk mengembangkannya*
- *Lakukan apa yang menurutmu benar dan yakinlah dengan apa yang kamu lakukan*

### ***Persembahan***

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara saudariku tercinta yang selalu mendoakan serta dengan kasih sayang, kesabaran dan kedisiplinan mencurahkan segala daya, upaya dan seluruh kemampuan ditengah keterbatasan-keterbatasan yang ada.*
- *Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku*
- *Almamaterku tercinta Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 12 April 2004

Penulis.

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

**F. Antonius Tuli Marang  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2004**

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan yang diterapkan Pemerintah Daerah saat ini, 2) Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini, 3) Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini, 4) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan menurut Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2002.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, 2) Pemerintah Kabupaten Sleman menemui hambatan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu: a) Sumber daya manusia dalam hal penyusunan sisten tata buku berpasangan, b) Tingkat Dinas dalam hal penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, c) Untuk tingkat Kabupaten dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian.

## **ABSTRACT**

### **THE APPLICATION OF LOCAL AND CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD**

#### **A Case Study at Sleman Local Government**

**F. Antonius Tuli Marang  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta**

The purposes of this research were: 1) To know how the local government apply the financial report making, 2) To know the application of the financial report based on Local and Central Government Accounting Standard being used recently, 3) To know wether the government have applied those standards, 4) To know the barriers in implementing those standards.

The technique of collecting data were literaturrel research and field research consisting of interview, observation, and documentation. While the technique of analysing data was qualitative one. That technique was used to know the procedure of financial report arrangement based on The Draft of Publicated Local and Central Government Accounting Standard during 2002.

The result of the research were: 1) Sleman local government have already applied the standard, 2) There are some barriers in applying it, those were: a) Human resource of making the financial report in double entry system, b) Official level in making the financial report based on the recent standard, c) Local government level in making consolidated or combined financial report.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

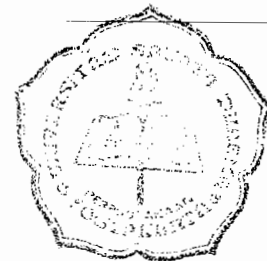
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak yang dengan tulus hati membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Hg.Suseno T.W., MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Ibu Fr. Reni Retno A, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Lilis Setiawati, S.E., MSi., Ak., l yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Drs.YP. Supardiyono, M.Si., Ak yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak A. Diksa Kuntara, S.E., yang selalu memberikan masukan dan dukungan buat saya disaat saya menemukan kesulitan dan hambatan-hambatan



6. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan selama penulis belajar dibangku kuliah.
8. Bapa Paternus K. Marang dan Mama Bernadetha De Ornay yang senantiasa memberikan perhatian, cinta kasih dan pelajaran akan hidup.
9. Bapak Drs. Suseno, M.Si sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi dan segenap karyawan karyawan kantor BAPPEDA Kabupaten Sleman tempat penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Drs. Bambang Priyambodo yang mewakili Kepala kantor BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH.
11. Teman Ade Soeban Pulo yang telah merelakan komputernya selama penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku: anak kost Arimbo 2c; Yohanes Gunawan, Alfonsus Djebarus, Rommy Oleona, Ramses Marbun; teman-teman kelompok "TJ": Hans Tukan, John Liliwery, Frengky Safe, Eman Kabelen, dan Kris yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang memberikan dukungan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam tulisan ini dapat diketahui dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	6
A. Akuntansi Pemerintahan .....	6
1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan .....	6
2. Kekhususan Akuntansi Pemerintahan .....	6
3. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan .....	7
B. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan .....	8
1. Peranan Pelaporan Keuangan .....	8
2. Tujuan Pelaporan Keuangan .....	10
C. Komponen-Komponen Laporan Keuangan .....	11
1. Laporan Realisasi Anggaran .....	11
2. Neraca .....	13
3. Laporan Arus Kas .....	15

4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	16
D. Peranan Anggaran Publik.....	17
1. Pengertian.....	17
2. Pentingnya Anggaran Publik.....	18
3. Fungsi Anggaran Publik.....	19
E. Keuangan Daerah.....	20
a. Pengertian.....	20
b. Sumber Keuangan Daerah.....	21
c. Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
D. Data yang Dicari.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman .....	28
B. Geografi.....	30
C. Kelembagaan.....	31
D. Aparat Pemerintah.....	32
E. Kependudukan.....	33
F. Kondisi Wilayah .....	34
G. Agama dan Pendidikan .....	35
H. Kesehatan .....	38
I. Perekonomian .....	39
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Data.....	42
1. Neraca .....	43
2. Laporan Arus Kas .....	43
3. Laporan Surplus-Defisit.....	46

4. Laporan Perhitungan Anggaran .....	50
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	52
<b>B. Laporan Keuangan Menurut Draft Publikasian PSA Pemerintah</b>	
Pusat dan Daerah .....	57
1. Basis Akuntansi.....	57
2. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	58
3. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan .....	59
4. Unsur-unsur Laporan Keuangan yang Terdapat dalam Draft Publikasian PSA Pemerintah Pusat dan Daerah.....	60
a. Neraca.....	60
b. Laporan Realisasi Anggaran .....	64
c. Laporan Arus Kas.....	67
<b>C. Perbandingan Laporan Keuangan Menurut Draft Publikasian PSA Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman .....</b>	<b>74</b>
1. Persamaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi yang berlaku .....	74
2. Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.....	84
<b>D. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Keterbatasan Penelitian .....	88
C. Saran-Saran.....	89

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Susunan Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman	31
Tabel 4.2 Susunan Komposisi Agama di Kabupaten Sleman	36
Tabel 4.3 Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Sleman	38
Table 4.4 Sarana Kesehatan di Kabupaten Sleman	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 25 tentang pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan secara transparan, ekonomis, efisien dan efektif. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka diperlukan suatu sistem yang andal, mudah dipahami yang mampu menyajikan informasi tentang posisi keuangan dalam rangka memenuhi

kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya.

Oleh karena itu Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan suatu standar akuntansi pemerintah yang baku. Alasan-alasan perlunya standar akuntansi antara lain:

1. Terdapat keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi sehingga mendorong komparabilitas laporan keuangan
2. Laporan keuangan menjadi lebih informatif bagi pihak ekstern yang tidak terlibat langsung dengan Pemerintah Daerah
3. Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan daerahnya

Standar akuntansi merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi pihak ekstern sehingga dapat dimengerti dan dapat dihindari munculnya bias pemahaman oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana diketahui bahwa kita memiliki daerah propinsi, kabupaten, kota yang kondisinya satu sama lain berbeda tingkat kemajuan, antara lain disebabkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya, maka laporan keuangan yang disusun harus disesuaikan dengan kondisi daerah itu sendiri dalam hal sumber daya dan pendapatan asli daerahnya. Untuk itu standar akuntansi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam menjamin keseragaman praktik-praktik akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah.

Dengan melihat pentingnya standar akuntansi yang baik bagi daerah, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul: **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti:

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah ?

#### **C. Batasan Masalah**

1. Mengingat luasnya Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah pada: pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Laporan Keuangan tahun 2002
2. Standar akuntansi yang dimaksud adalah standar akuntansi yang terdapat dalam Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah



3. Laporan keuangan yang dimaksud disini dibatasi pada laporan keuangan yang terdapat dalam Draft yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan yang diterapkan pemerintah daerah saat ini
2. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini.
3. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar daerah dapat mengetahui bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap laporan keuangannya sehingga bisa dijadikan masukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah selanjutnya.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan pemerintah pusat dan

daerah bagi civitas akademika sehingga dapat menambah fungsi universitas sebagai wahana menggali ilmu pengetahuan.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta pengetahuan bagi penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akuntansi Pemerintahan**

##### **1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan berkaitan dengan proses pengolahan data akuntansi bagi organisasi pemerintahan yang tidak bertujuan menghasilkan laba. Kegiatan akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan: penganalisaan, pencatatan dan penyimpulan pelaporan dan penginterpretasian transaksi-transaksi unit dan agensi lembaga pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan dapat juga diartikan sebagai akuntansi mikro yang berfungsi khusus menyajikan informasi keuangan bagi lembaga pemerintahan yang nantinya dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.

##### **2. Kekhususan Akuntansi Pemerintahan**

Secara fundamental pencatatan dan pelaporan akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi komersial, karena adanya kondisi operasi dan tujuan operasi yang bersifat khusus.

Perbedaan kondisi pada akuntansi pemerintahan (Kustadi, 1986: 15):

- a. Tidak diperlukannya pencatatan laba atau rugi kecuali pada unit perusahaan.
- b. Tidak diperlukan pencatatan milik pribadi.

- c. Pencatatan sendiri harus ada buat dana yang sebaiknya merupakan satuan keuangan dan pembukuan lengkap.
- d. Pembukuan harus disediakan juga buat keperluan pengawasan anggaran.

Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralisasi menyebabkan tumbuhnya sifat sentralisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan Indonesia sehingga akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah akuntansi pemerintah pusat (Baswir, 2000: 8).

Lingkup akuntansi pemerintahan adalah (Halim, 2002: 30):

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - a. Akuntansi tingkat Propinsi
  - b. Akuntansi tingkat Kabupaten/Kota
3. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut (IAI, 2002a: 3):

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang di berikan :
  - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
  - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah

- c. Adanya pengaruh proses politik
  - d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintahan
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
- a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian
  - b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
  - c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

## **B. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan**

### **1. Peranan Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (IAI, 2002a: 12):

a. Akuntabilitas: adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu: DPR/DPRD dan masyarakat.

Guna meningkatkan akuntabilitas keuangan, maka harus dijalankan beberapa prinsip berikut:

1. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua pengeluaran yang dilakukan harus diorientasikan kepada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dicapai sesuai kebutuhan masyarakat

b. Manajerial: membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

- d. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*): membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## 2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan (IAI, 2002b: 9):

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahannya.

### **C. Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan adalah (IAI, 2002b: 15):

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang disajikan oleh unit yang memegang fungsi perbendaharaan. Laporan Realisasi Anggaran dikenal juga dengan istilah Laporan Perhitungan Anggaran. Laporan Arus Kas dikenal juga Laporan Aliran Kas. Sedangkan Nota Perhitungan Anggaran merupakan bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran dikenal juga dengan istilah Laporan Perhitungan Anggaran. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan



ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan ini juga menyajikan ikhtisar, sumber alokasi dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran harus menyajikan pos-pos sebagai berikut (IAI, 2002b: 18):

- a. Pendapatan: semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat / daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah.
- b. Belanja adalah: semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- c. Surplus/defisit  
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
- d. Pembiayaan adalah: seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e. Transfer masuk adalah: penerimaan uang dari entitas lain seperti penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Dana cadangan adalah: dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

## 2. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut (IAI, 2002b: 19):

- a. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, setara dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Asset diklasifikasikan ke dalam asset lancar dan non lancar.

Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Asset yang tidak

dimasukan dalam criteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset non lancar.

Asset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, dan persediaan.

Asset non lancar mencakup asset keuangan jangka panjang. Asset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi permanent, asset tetap, dan asset lainnya.

Asset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan.

Asset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai asset lainnya.

Termasuk dalam asset lainnya antara lain asset tak berwujud dan dana cadangan.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sebaliknya kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Ekuitas dana lancar yaitu selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi yaitu selisih antara asset non lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antar aktivitas investasi, pembiayaan, dan non anggaran (IAI, 2002d: 10).

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut (IAI, 2002a: 35):

- a. Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan menyajikan informasi yang biasanya disajikan dalam Nota Perhitungan APBN/APBD dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain (IAI, 2002b: 34):

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

#### **D. Peranan Anggaran Publik**

##### **1. Pengertian**

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi dalam hal ini organisasi pemerintahan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2002: 62).

Anggaran publik berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)

## 2. Pentingnya anggaran publik

Alat utama kebijakan fiscal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

### 3. Fungsi anggaran sektor publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama:

#### a. Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

#### b. Sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran publik digunakan untuk mengendalikan/membatasi kekuasaan eksekutif.

#### c. Sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### d. Sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.



e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping itu anggaran publik berfungsi juga sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian untuk dilaksanakan.

f. Sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen eksekutif kepada pemberi wewenang. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

g. Sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*)

Masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan aspirasi maka akan terjadi tindakan seperti: tindakan massa.

## **E. Keuangan Daerah**

a. Pengertian

Keuangan daerah dalam arti keseluruhan merupakan harta benda yang menjadi kekayaan daerah (Wajong, 1993: 1).

Keuangan daerah menurut Supriatno, (1993: 174):

Kemampuan daerah untuk mengelolah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keuangan daerah menurut Mamesah, (1995: 16):

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas:

1. Keuangan daerah yang dikelola langsung: APBD dan barang inventaris milik daerah
2. Kekayaan daerah yang dipisahkan: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keadaan keuangan daerah menentukan corak, bentuk dan kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Daerah sebagai badan hukum publik, yang atas dasar pemberian hak otonomi, mempunyai kebebasan memelihara dan memajukan kepentingan daerah dengan keuangan sendiri.

b. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah no 22 tahun 1999 penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana Perimbangan
  - a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
  - b. Dana alokasi umum
  - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- c. Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelola keuangan daerah terbagi atas beberapa satuan yang terpisah:

1. Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda): bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, membuat catatan keuangan dan membukukan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat oleh biro/bagian keuangan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran tahunan dan menyiapkan rencana pembangunan lima tahun daerah.

3. Bagian Pembangunan: bertugas sebagai koordinator proyek-proyek yang dibiayai dari APBD dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan.
4. Dinas Pendapatan Daerah: bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan bertugas memungut pajak, retribusi daerah, biaya surat ijin dan kutipan lain-lain. Bertanggung jawab juga sebagai koordinator kegiatan membantu dan melaporkan semua penerimaan.
5. Bank Pembangunan Daerah (BPD): menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang dan menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah
6. Masing-masing pemerintah daerah memiliki Inspektorat (Inspektorat Wilayah Daerah): tugasnya memeriksa keuangan daerah.

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah (Maris, 2000: 279):

1. Ketanggungjawaban (*Accountability*): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan: keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kejujuran: urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan berbuat curang diprkecil.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah: tata cara mengurus keuangan daerah harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan

pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian: petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan di atas dapat dicapai.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus, yaitu: penelitian yang menggunakan beberapa elemen, kemudian masing-masing dianalisis.

#### **B. Subyek dan obyek penelitian**

1. Subyek penelitian yaitu:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
  - c. Bagian Belanja Daerah
  - d. Bagian Keuangan Daerah
  - e. Biro Pusat Statistik
  - f. Pihak-pihak lain yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah
2. Obyek penelitian
  - a. Prosedur penyusunan Laporan keuangan
  - b. Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2002

#### **C. Tempat dan waktu penelitian**

- a. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman

b. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan September tahun 2003

**D. Data yang dicari**

- a. Gambaran Umum Daerah
- b. Laporan keuangan selama satu periode
- c. Kondisi Daerah secara umum dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
- d. Hambatan yang dihadapi Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah

**E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi ini diharapkan akan diperoleh tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahannya.

2. Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan keterangan yang obyektif mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan yang ada, data-data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memaparkan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saat ini.
- b. Memaparkan penyajian Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan diberlakukan.
- c. Membandingkan Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku, dan mencari perbedaannya.
- d. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini.



**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman**

**1. Mengungkap Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman**

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijksblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah.

## **2. Dasar Pertimbangan**

Adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah:

- a. Usia penamaan yang paling tua mampu menumbuhkan perasaan bangga dan mempunyai keterkaitan batin yang kuat terhadap masyarakat.
- b. Memiliki ciri khas yang mampu membawa pengaruh nilai budaya. Bersifat Indonesia sentris, yang dapat semakin menjelaskan peranan ciri keindonesiaan tanpa menyalahgunakan obyektivitas sejarah.

- c. Mempunyai nilai historis yang tinggi, mengandung nilai dan bukti sejarah yang dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan nenek moyang kita.
- d. Merupakan peninggalan budaya Jawa yang murni, tidak terpengaruh oleh budaya kolonial.

## **B. Geografi**

### 1. Geografi

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten dari empat kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman terletak diantara  $107^{\circ} 15'$  Bujur Timur dan  $100^{\circ} 29'$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34'$  Lintang Selatan dan  $7^{\circ} 47'$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian antara 1000-2500 meter diatas permukaan laut. Beberapa sungai yang mengalir melalui kabupaten ini seperti Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Boyong dan Sungai Kuning.

### 2. Batas Wilayah

Kabupaten Sleman mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Boyolali (Propinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Klaten (Propinsi Jawa Tengah)

Selatan : Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta (Propinsi DIY)

Barat : Kabupaten Kulon Progo (Propinsi DIY), dan kabupaten Purworejo(Propinsi Jawa Tengah)

### 3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574 Km<sup>2</sup> dimana secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, 1212 dusun.

## C. Kelembagaan

Susunan kelembagaan Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 12, Tahun 2001 yang terdiri dari 32 instansi otonomi, yaitu 2 Sekretariat, 3 Kantor, 3 Badan, 7 Dinas dan 17 Kecamatan. Selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Susunan Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman

No	Nama Instansi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan
3	Kantor Kepegawaian Daerah
4	Kantor Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan
5	Kantor Dampak Lingkungan
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
7	Badan Pengawasan Daerah
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Dinas Kesejahteraan Masyarakat
10	Dinas Kesehatan
11	Dinas Ketentraman dan Ketertiban
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

13	Dinas Pertanian dan Kehutanan
14	Dinas Perekonomian
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan
16	Kecamatan Berbah
17	Kecamatan Cangkringan
18	Kecamatan Depok
19	Kecamatan Gamping
20	Kecamatan Godean
21	Kecamatan Kalasan
22	Kecamatan Moyudan
23	Kecamatan Minggir
24	Kecamatan Mlati
25	Kecamatan Ngaglik
26	Kecamatan Ngemplak
27	Kecamatan Pakem
28	Kecamatan Prambanan
29	Kecamatan Seyegan
30	Kecamatan Sleman
31	Kecamatan Tempel
32	Kecamatan Turi

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Sleman, [www.Sleman.go.id](http://www.Sleman.go.id)

Sedangkan untuk instansi vertikal ada 7 (tujuh) buah yaitu adalah Badan Pertahanan Nasional, Pengadilan Agama, Kandep Agama, Badan Pusat Statistik, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

#### **D. Aparat Pemerintah**

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hingga bulan Desember 2001, di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman terdapat 14.218 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 6.255 (43,99%) PNS wanita dan 7.963 (56,01%) PNS laki-laki.

Dari jumlah PNS yang ada, rasio pegawai terhadap jumlah penduduk 1: 60,24 artinya seorang pegawai melayani 60,24 jiwa penduduk. Latar belakang pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 36 orang atau 0,25%, S1 sebanyak 2.535 orang atau 17,83%, Diploma sebanyak 4.867 orang atau 34,23 %, SLTA sejumlah 5.665 orang atau 39,84%, SLTP sebanyak 589 orang atau 4,14 %, SD sebanyak 526 orang atau 3,70%. Sementara berdasarkan golongan PNS Sleman terdiri dari 2,80% atau 398 orang Gol I, 21,30% atau 3.028 orang Gol II, 57,64% atau 8.195 orang Gol III dan 18,27% atau 2.597 orang Gol IV.

Formasi jabatan struktural yang terdapat di Kabupaten Sleman sebanyak 442 yang terdiri dari 1 Jabatan eselon II.a, 14 jabatan eselon II.b, 69 jabatan eselon III.a, 17 jabatan eselon III.b dan 341 jabatan eselon IV.a. Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai dengan bulan Desember 2001 sebanyak 10.482 yang terdiri dari guru TK 490 orang, guru SD 4.216 orang, guru SLTP 2.705 orang, guru SMU 1.024 orang, guru SMK 866 orang, guru SLB 173 orang, pengawas 47 orang, tenaga fungsional medis 783 orang, pustakawan 4 orang, arsiparis 16 orang, penyuluh pertanian 138 orang, penyuluh kehutanan 18 orang dan penyuluh perindustrian 2 orang.

## **E. Kependudukan**

### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman sampai dengan akhir tahun 2000 adalah 850 176 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin pria sebanyak 420159 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 430 071 jiwa.

Dalam setiap tahunnya Kabupaten Sleman mengalami peningkatan jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1996 jumlah penduduk sebanyak 8090490 jiwa, tahun 1998 jumlah penduduknya sebanyak 828 960 jiwa dan pada tahun 1999 jumlah penduduknya sebanyak 838 628 jiwa.

## 2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2000 adalah 1479 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan luas areal 574,32 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Depok dengan 3069 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan luas areal 355,55 Km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Cangkringan yaitu 26,54 per Km<sup>2</sup> dengan luas arealnya 47,99 Km<sup>2</sup>.

## F. Kondisi Wilayah

### 1. Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman adalah:

#### a. Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Sleman adalah jenis tanah *litosol*, *regosol*, *latosol* dan *gramusol*. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat digunakan

untuk tanah pertanian, perkebunan, perikanan, pekarangan dan dan pembangunan. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah kawasan hutan yang luasnya 6483 ha atau sekitar 11% dari seluruh luas Kabupaten Sleman. Kawasan hutan negara digunakan untuk hutan wisata seluas 178 ha, hutang lindung 1228 ha dan hutang cagar alam seluas 165 ha ada pula hutan yang dikuasai oleh rakyat seluas 4600 ha.

b. Flora dan Fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang ada di Kabupaten Sleman adalah tanaman pangan meliputi padi, tanaman palawija dan tanaman hortikultura. Tanaman palawija mencakup komoditas jagung, kacang tanah, serta kacang hijau. Adapun jenis hortikurturanya meliputi sayur-mayur, buah-buahan dan tanaman hias. Sedangkan jenis hewannya meliputi hewan yang ditenakkan seperti: sapi potong, sapi perah, kambing dan ternak unggas.

## **G. Agama dan Pendidikan**

1. Agama

Kerukunan kehidupan intern umat dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali, toleransi antar umat beragama dan rasa kegotongroyongan diantara umat di Kabupaten Sleman,



menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sleman.

Walaupun demikian ada gejala penurunan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Komposisi penduduk menurut agama di Kabupaten Sleman:

Tabel 4.2

Susunan komposisi agama Kabupaten Sleman

<b>Jenis Agama</b>	<b>%</b>
Islam	91.29
Katholik	6.24
Kristen	2.28
Hindu	0.12
Budha	0.07

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Sleman, [www.Sleman.go.id](http://www.Sleman.go.id)

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan sumber daya manusia. kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah dengan prasarananya, pengajar dan keterlibatan anak didik. Pada tahun 2000 jumlah sekolah TK 441 buah; SD/MI 555 buah dengan jumlah ruang kelas 3.792 ruang, jumlah guru 4.760 orang, jumlah siswa 77.295 anak.

Sedang pada tahun 2001/2002 memiliki sebanyak 538 unit sekolah yang terdiri dari 438 SD negeri dan 100 SD swasta dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2.794 kelas untuk SD negeri dan 656 kelas untuk SD swasta. Jumlah guru SD yang terlibat mencapai 4.280 orang di SD negeri dan 407 orang di SD swasta.

Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 77.226 anak yang terbagi menjadi 63.852 anak bersekolah di SD negeri dan 13.374 anak di SD swasta.

Pada tahun 2000 jumlah sekolah tingkat SLTP + MTs sebanyak 130 buah, jumlah ruang kelas 1.270 kelas, jumlah guru 3.401 orang dan jumlah siswa 37.946 anak.

Pada tahun 2000/2001 untuk jenjang SLTP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 108 sekolah yang terdiri 54 SLTP negeri dan 54 SLTP swasta dengan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 668 kelas untuk SLTP negeri dan 236 kelas untuk SLTP swasta. Jumlah guru yang mengajar di SLTP tercatat sebanyak 2.859 orang. Sebagian besar dari mereka yakni sekitar 1.950 orang mengajar di SLTP negeri dan selebihnya di SLTP swasta.

Adapun murid yang bersekolah di SLTP pada tahun 2001/2002 mencapai 31.084 orang yang terdiri dari 25.033 orang di SLTP negeri dan SLTP swasta sebanyak 6.051 orang.

Untuk tahun 2000/2001 khusus SMU (Sekolah Menengah Umum) di Kabupaten Sleman terdapat sebanyak 52 sekolah yang terdiri dari 17 SMU

negeri dan 35 SMU swasta. Dengan mengamati jumlah institusi, terlihat bahwa peran swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMU relatif lebih besar disbanding peran pemerintah.

Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 48 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 41 sekolah. Jumlah guru swasta yang terlibat juga lebih besar, yaitu sekitar 1.286 orang dan sebanyak 515 orang mengajar di SMK negeri. Adapun jumlah murid yang memilih sekolah di SMK tercatat sebanyak 12.929 di SMK swasta dan 5.735 di SMK negeri untuk penyelenggaraa SMK, peran swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan SMK negeri.

## H. Kesehatan

Pada tahun 2000 keadaan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Sleman cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

Tabel 4.3  
Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Sleman

No	Jenis Indikator	Nilai
1	Angka Kematian Bayi	11,25 permil
2	Angka Kematian Balita	0,32 permil
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	84,6 per 100,000 kelahiran hidup
4	Rata-rata usia harapan hidup laki-laki	71 tahun
5	Rata-rata usia harapan hidup perempuan	72 tahun
6	Status gizi kurang	11,97 %
7	Status gizi buruk	0,91 %
8	Masyarakat bergizi lebih	1,70 %
9	Angka kecukupan gizi	-Protein 49,72% - Energi 1857,37 KKL dari target 2,150 KKL

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Sleman, [www.Sleman.go.id](http://www.Sleman.go.id)

Data jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Sleman, meliputi :

Tabel 4.4

Sarana Kesehatan Kabupaten Sleman

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pemerintah	3
2	Rumah Sakit Umum Swasta	4
3	Rumah Sakit Khusus	2
4	Rumah Sakit Kebidanan	2
5	Rumah Sakit Jiwa	1
6	Apotik	51
7	Puskesmas	33
8	Puskesmas dengan tempat perawatan	4
9	Puskesmas Pembantu	66
10	Puskesmas Keliling	31

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Sleman, [www.Sleman.go.id](http://www.Sleman.go.id)

Ketersediaan berbagai sarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman cukup memadai yaitu:

- Jumlah Puskesmas untuk per 100.000 penduduk sebanyak 3,5.
- Jumlah dokter per Puskesmas sebanyak 2,2.
- Jumlah dokter per 100.000 penduduk sebesar 27,3.
- Angka rasio tenaga medis/sarana kesehatan terhadap penduduk menunjukkan satu dokter: 24.250 jiwa, satu para medis/bidan : 1.780 jiwa, dan satu Puskesmas 40.086 jiwa.

## I. Perekonomian

Sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sleman adalah sector pertanian, industri, pertambangan dan galian dan sector pariwisata.

1. Masyarakat Kabupaten Sleman sabagian besar mata pencahariannya adalah dari pertanian. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian adalah 24,291 ha. Sektor pertanian yang dilakukan di Kabupaten Sleman meliputi pertanian untuk tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.

## 2. Sektor industri

Usaha industri yang dilakukan dipisahkan menjadi sector industri rumah tangga, sector industri kecil, sector industri sedang dan sector industri besar. Industri merupakan salah satu sector yang turut mendukung dan menopang perekonomian. Industri rumah tangga adalah industri yang dilakukan oleh keluarga dengan jumlah tenaga kerjanya kurang dari 10 orang. Industri sedang adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang, dan industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Jumlah industri besar yang ada sebanyak 150 buah, industri menengah 437 buah, industri perorangan 2500 buah. Jenis industri yang paling banyak adalah industri kerajinan seperti kerajinan kulit, kerajinan dari kayu, kerajinan dari tanah liat, kerajinan dari batu dan kerajinan dari bamboo. Selain kerajinan ada juga industri tekstil.

## 3. Pertambangan dan Galian

Banyaknya usaha pertambangan dan galian di Kabupaten Sleman adalah berjumlah 378 buah. Jenis pertambangan dan galian yang berpotensi untuk diusahakan termasuk dalam golongan bahan tambang galian C, seperti :

- a. Batu di daerah Cangringan dan Tempel.
- b. Pasir di daerah Cangringan, Tempel dan Kalasan.
- c. Tanah liat di daerah Godean, Prambanan, Tempel dan Seyegan.
- d. Batu kapur di daerah Prambanan.
- e. Sirtu di daerah Ngemplak dan Ngaglik.

#### 4. Pariwisata

Kabupaten Sleman yang merupakan bagian kota budaya dan pariwisata memiliki beberapa obyek wisata. Obyek wisata yang ada dibedakan menjadi dua yaitu wisata budaya dan wisata alam. Obyek wisata alam yang ada seperti hutan taman Plawangan, obyek wisata Kali Adem, dan obyek wisata kali Kuning. Sedangkan yang termasuk obyek wisata budaya adalah Museum Dirgantara Mandala, Monumen Yogya Kembali, Museum Affandi dan Candi Prambanan.

#### 5. Sarana Perhubungan

Salah satu sarana perhubungan adalah jalan. Jenis jalan yang ada adalah jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Panjang jalan propinsi sepanjang 139,69 km, panjang jalan kabupaten sepanjang 1085,13 km dan jalan desa sepanjang 2764,13 km.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman yang berlokasi di Propinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Draft Publikasian. Untuk itu data yang terutama diperlukan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2002. laporan keuangan terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan diperolehnya data diatas maka akan dapat dianalisis dan diketahui seberapa jauh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Laporan Keuangannya.

Penyajian laporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini menggunakan acuan :

1. Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
2. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) : karena dalam IPSAS mengatur Laporan Kinerja (laporan Surplus Defisit)

Berikut ini unsur –unsur penyajian laporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman berbasis IPSAS:

## 1. Neraca

Laporan Neraca merupakan suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Neraca daerah menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada suatu tanggal tertentu, ditinjau dari sudut aktiva, kewajiban dan ekuitas. Neraca berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada yang berhak. Informasi neraca berguna untuk memprediksi kemampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Bentuk neraca yang dipakai Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 1a.

## 2. Laporan Arus Kas / Aliran Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan arus kas dilihat dari tiga sisi, yakni dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Aliran kas menyajikan informasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi ini juga berguna untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai



pemerintah daerah. Informasi ini juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai pemerintah daerah karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

Laporan Arus Kas Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN ALIRAN KAS**  
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2002  
 (Rupiah)

<b>A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Aliran kas masuk dari aktifitas Operasi	
Aliran kas keluar dari aktifitas Operasi	
- Kenaikan aktiva lancar non kas	7.010.648.457,89
- Penurunan Hutang jangka pendek	21.032.390.706,12
	<u>(28.043.039.164,01)</u>
Aliran kas bersih dari aktivitas operasi	
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
Aliran kas masuk dari aktifitas Investasi	
Aliran kas keluar dari aktifitas Investasi	
- Kenaikan investasi jangka panjang	2.584.904.236,42
- Kenaikan Aktiva Tetap	13.869.909.385,00
	<u>(16.454.813.621,42)</u>
Aliran kas bersih dari aktivitas Investasi	
<b>C. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	
Arus kas masuk dari aktifitas Pembiayaan	
- Kenaikan Ekuitas Dana	71.301.803.625,25
Arus Kas keluar dari aktivitas pembiayaan	
- Penurunan Hutang Jangka Panjang	1.05.487.011,04
Aliran kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	
	<u>70.286.316.614,21</u>
<b>Kenaikan Kas</b>	<u>25.788.463.828,78</u>
<b>Saldo Awal</b>	<u>19.821.049.328,87</u>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>45.609.513.157,65</b>
<b>Saldo Kas tersebut terdiri atas:</b>	
- Kas di Pegang Kas	3.473.078.608,98
- Kas di Kasda	42.136.434.548,67
	<u>45.609.513.157,65</u>

### 3. Laporan Surplus Defisit / Laporan Kinerja Keuangan

Dalam perusahaan bisnis, laporan ini biasa disebut laporan laba-rugi. Laporan Surplus-Defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (Pemerintah Daerah). Kinerja dalam hal ini digambarkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan surplus. Sedangkan dalam akuntansi, surplus atau defisit merupakan selisih dari seluruh pendapatan dan seluruh biaya. Ketika total pendapatan lebih besar dari biaya, maka terjadi surplus. Ketika total biaya lebih besar dari total pendapatan, maka terjadi defisit.

Laporan Surplus-defisit berguna untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas Pemerintah dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Lebih lanjut, laporan surplus-defisit berguna dalam menilai efektivitas pemerintah kabupaten dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Laporan Surplus / Defisit Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**Pemerintah Kabupaten Sleman  
Laporan Surplus Defisit  
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2002**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b><i>PENDAPATAN</i></b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
PAJAK DAERAH	20.321.115.848.04
RETRIBUSI DAERAH	10.387.652.275.11
BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH	1.971.054.416.32
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.158.643.436.25
	<hr/>
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>35.838.465.975.72</b>
 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	
Bagi Hasil Pajak	27.629.184.742.02
Bagi Hasil Bukan Pajak	336.372.325.24
Dana Alokasi Umum	255.350.000.000.00
Dana Perimbangan Dari Propinsi	16.645.698.022.32
	<hr/>
<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>	<b>299.961.255.089.58</b>
 <b>LAIN-LAIN DANA PENDAPATAN YANG SAH</b>	
Dana Penyeimbang	23.716.650.000.00
Dana Luncuran	419.736.876.00
Pengganti Gaji Sekolah Luar Biasa (SLB)	4.093.191.974.00
Bantuan Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	213.982.606.00
	<hr/>

<b>Jumlah Lain-lain Dana Pendapatan Yang Sah</b>	<b>28.922.587.156.00</b>
--	--------------------------

<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>364.722.308.221,30</b>
--------------------------	---------------------------

**BELANJA****BELANJA ADMINISTRASI UMUM**

BELANJA PEGAWAI	56.472.578.835.35
BELANJA BARANG DAN JASA	5.372.024.221.50
BELANJA PEMELIHARAAN	2.371.650.265.00
BELANJA PERJALANAN DINAS	373.598.600.00
<b>Jumlah Belanja Administrasi Umum</b>	<b>64.589.851.921.85</b>

**BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK**

BELANJA PEGAWAI	197.138.801.741.29
BELANJA BARANG DAN JASA	12.380.355.634.12
BELANJA PEMELIHARAAN	4.703.929.702.00
BELANJA PERJALANAN DINAS	308.400.000.00
<b>Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik</b>	<b>214.531.487.077.41</b>

**BELANJA INVESTASI**

BELANJA INVESTASI APARATUR	-
BELANJA INVESTASI PUBLIK	1.796.433.125.00
<b>Jumlah Belanja Investasi</b>	<b>1796.433.125.00</b>

**BELANJA TRANSFER**

Bantuan Organisasi Sosial	2.785.102.350.00
Bantuan Organisasi Profesi	2.785.102.350.00
Bantuan Organisasi Politik	253.313.500.00
Bantuan Instansi Vertikal	1.894.681.500.00
Bantuan Organisasi Lainnya	6.456.879.893.00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>14.445.417.243.00</b>
<b>BELANJA TAK TERSANGKA</b>	<b>1.309.000.000.00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>296.672.189.367.26</b>
<b>SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b>680.050.118.854.04</b>



#### 4. Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode.

Berikut ini merupakan ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja tahun 2002:

Realisasi Pendapatan: (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Pencapaian
Penerimaan Daerah	367.365.42	383.092.72	104.28%
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	15.301.66	15.301.66	100.00 %
PAD	34.846.98	38.908.19	111.65 %
Dana perimbangan	288.837.39	299.961.25	103.85 %
lain-lain dana pendapatan yang sah	28.379.39	28.921.61	101.91 %

Realisasi Belanja: (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Pencapaian
Belanja Daerah	367.365.42	338.093.08	92.03%
▪ Administasi Umum	87.21.21	81.779.00	93.77 %
▪ Operasi & Pemeliharaan sarana pra-sarana publik	232.830.81	215.367.52	92.50 %
▪ Investasi	29.346.80	24.367.52	84.91 %
▪ Transfer	15.643.20	14.720.31	94.10 %
▪ Tak tersangka	2.334.38	1.309.00	56.07 %

Setelah diketahui realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2002, maka sisa perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2002 dapat diketahui sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Perhitungan Anggaran Pendapatan	383.092.723.289.42
Perhitungan Anggaran Belanja:	
Administrasi Umum	81.779.004.913.65
Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana publik	215.367.510.590.39
Investasi	24.917.258.739.42
Transfer	14.720.307.243.00
Tak terduga	1.309.000.000.00
	<hr/>
	338.093.081.486.46
<b>Sisa lebih perhitungan APBD 2002</b>	<b>44.999.641.802.96</b>
Sisa kas per 31 Desember 2002	42.136.434.548.67
Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang disetor setelah 31 Desember 2002	2.862.967.556.79
Pembukuan Administrasi yang menambah sisa Perhitungan	242.799.50
Pembukuan Administrasi yang mengurangi sisa Perhitungan	3.102.00
	<hr/>
<b>Jumlah Sisa lebih Perhitungan APBD 2002</b>	<b>44.999.641.802.96</b>
<b>Urusan Kas dan Perhitungan:</b>	
Realisasi Pendapatan	32.564.356.741.00
Realisasi Belanja	32.555.599.941.00
	<hr/>
Sisa	8756.800.00



Secara keseluruhan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat pada format penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Pemerintah Kabupaten Sleman pada lampiran 1b.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Januari 2002 adalah berdasarkan SK Bupati nomor 11/Kep.KDH/A2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan neraca adalah sebagai berikut:

##### a. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Pemegang Kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

##### b. Piutang

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya, Misalnya: Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

c. Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat pada akhir tahun perioda akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi. . Investasi Jangka Panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. .

Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/BUMD dan lembaga keuangan negara, menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam BUMN/BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan dimana

Pemerintah Daerah memiliki 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

- 2) Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pinjaman yang diberikan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan lembaga internasional.
- 3) Investasi Permanen lainnya menggambarkan semua biaya investasi permanen lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu perkiraan investasi permanent di atas.

e. Asset Tetap

Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu perioda akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, penukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Asset Tetap terdiri atas:

- 1) Tanah
- 2) Jalan dan Bangunan Irigasi
- 3) Gedung
- 4) Mesin dan Peralatan
- 5) Kendaraan
- 6) Mebel dan Perlengkapan

Asset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai histories, yaitu harga perolehan. Bila Asset Tetap dengan menggunakan nilai histories tidak memungkinkan, maka nilai Asset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Dalam hal penilaian Asset Tetap dengan nilai histories maupun harga perolehan yang diestimasi tidak memungkinkan, maka Asset Tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam neraca dengan nilai Rp. 1,00 untuk tiap satuan barang. Asset Tetap Pemerintah Daerah belum mengenal adanya penyusutan. Asset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan.

f. Asset Lainnya

Asset Lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi jangka panjang dan asset tetap.

Asset Lainnya terdiri atas:

- 1) Piutang angsuran penjualan aktiva tetap
- 2) Bangunan dalam pengerjaan
- 3) Built Operate and Transfer (BOT): adalah submodel kerjasama dimana Pemerintah memberikan konsesi segmen usaha tertentu kepada mitra kerjasama, dan mitra kerja menanamkan modalnya serta mengoperasikan segmen usaha yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan royalti/bagi hasil kepada Pemerintah. Setelah masa kerjasama berakhir mitra

kerjasama menyerahkan seluruh asset yang telah dibangun dan dioperasikan kepada Pemerintah

Asset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal piutang angsuran dan penjualan asset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak. Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan lebih dari satu tahun angsuran.

g. Hutang Lancar

Hutang Lancar merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu perioda akuntansi.

Hutang Lancar terdiri atas:

- 1) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu perioda akuntansi.
- 2) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran.
- 3) Hutang Biaya Pinjaman merupakan hutang yang terjadi sebagai ikutan hutang pokok yang berupa bunga, denda. Hutang Biaya Pinjaman sebesar nilai nominal.
- 4) Perhitungan Pihak Ketiga merupakan hutang jangka pendek kepada pihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM).

Hutang Lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

h. Hutang Jangka Panjang

Hutang Jangka Panjang merupakan hutang yang dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu perioda akuntansi. Hutang Jangka Panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

**B. Laporan Keuangan Menurut Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah**

**1. Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.

Basis kas ~~untuk~~ laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas umum negara/kas daerah atau entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pemerintah tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa perhitungan anggaran(lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban bukan tunai seperti bantuan asing dalam

bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada laporan realisasi anggaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa, asset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## **2. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan**

Kriteria pengakuan secara umum didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.

### **a. Pengakuan Asset**

1. Asset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Asset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
3. Asset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan hasil kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.
4. Asset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas umum Negara/Daerah.

d. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah dan telah dipertanggungjawaban

**3. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima dari sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



#### **4. Unsur-unsur laporan keuangan yang terdapat dalam Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah:**

##### **a. Neraca**

Setiap entitas harus mengklasifikasikan assetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.

Asset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. Pos-pos piutang piutang meliputi antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Asset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi permanen, asset tetap, dan asset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos asset non lancar yang disajikan di neraca

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Asset lancar dan Asset non lancar.

Informasi yang harus disajikan di neraca sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Piutang pajak dan bukan pajak yang timbul dari peraturan Perundang-undangan.
3. Piutang dari penjualan

4. Persediaan
5. Investasi permanen
6. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan
7. Kewajiban jangka pendek
8. Utang transfer
9. Kewajiban jangka panjang
10. Ekuitas dana

Pos-pos selain yang disebutkan diatas harus disajikan dalam neraca jika standar akuntansi pemerintah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas

Format neraca berdasarkan draft adalah sebagai berikut:

## Contoh Format Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

**NERACA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

No.	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		20x1	20x0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Pemegang Kas	xxx	xxx
5	Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	xxx	xxx
6	Piutang Lain-lain	xxx	xxx
7	Persediaan	xxx	xxx
8	Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
12	Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
13	<b>Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	xxx	xxx
14			
15	INVESTASI PERMANEN	xxx	xxx
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
17	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	xxx	xxx
18	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMD)	xxx	xxx
19	Pinjaman kepada Pemerintah pusat	xxx	xxx
20	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom	xxx	xxx
21	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
22	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
23	<b>Jumlah Investasi Permanen (16+17+18+19+20+21+22)</b>	xxx	xxx
24			
25	ASET TETAP	xxx	xxx
26	Tanah	xxx	xxx
27	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
28	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
29	Jalan,Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
30	Aset Tetap Lainnya		
31	Konstruksi dalam Pengerjaan		
32	<b>Jumlah Aset Tetap (26+27+28+29+30+31)</b>		
33		xxx	xxx
34	ASET LAINNYA	xxx	xxx
35	Tagihan Penjualan Angsuran		
36	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
37	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
38	Dana Cadangan	xxx	xxx
39	Aset Lain-lain	xxx	xxx
40	<b>Jumlah Aset Lainnya (35+36+37+38+39)</b>	xxx	xxx
41	<b>JUMLAH ASET (13+23+32+40)</b>	xxx	xxx

## Lanjutan

No.	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		20x1	20x0
42			
43	<b>KEWAJIBAN</b>		
44	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
45	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
46	Utang lainnya	xxx	xxx
47	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
48	Jumlah Kewajiban lancar (45+46+47)	xxx	xxx
49			
50	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
51	Utang Obligasi	xxx	xxx
52	Utang Bunga Obligasi	xxx	xxx
53	Utang Bunga Lainnya		
54	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (51+52+53)	xxx	xxx
55	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (48+54)</b>	xxx	xxx
56			
57	<b>EKUIDITAS DANA</b>		
58	<b>EKUIDITAS DANA LANCAR</b>		
59	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dana Lancar	xxx	xxx
60	Cadangan Piutang	xxx	xxx
61	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
62	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	xxx	xxx
63	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (60+61+62+63)	xxx	xxx
64	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
65	Diinvestasikan dalam Investasi Permanen	xxx	xxx
66	Diinvestasikan dalam aset tetap	xxx	xxx
67	Diinvestasikan dalam aset Lain-lain	xxx	xxx
68	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	xxx	xxx
69	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (66+67+68+69)	xxx	xxx
70		xxx	xxx
71	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
72	Diinvestasikan dalam dana cadangan	xxx	xxx
73	Jumlah ekuitas Dana Cadangan (72)	xxx	xxx
74	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (64+70+73)</b>	xxx	xxx
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	xxxx	xxxx

**b. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggarannya.

Laporan realisasi anggaran minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan netto
- h. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran

Dalam konteks laporan realisasi anggaran, aktivitas operasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh entitas dalam rangka mencapai tujuan utamanya. Belanja yang timbul dari aktivitas operasi dibedakan menurut belanja yang timbul dari aktivitas perolehan asset dan timbul dari aktivitas pembiayaan entitas.

Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran menurut jenis belanja. Contohnya sebagai berikut:



15	<b>PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEM. PROPINSI</b>						
16	Pendapatan bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Pendapatan bagi Hasil lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dari Pe. Prop. (16 s/d 17)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
19	<b>PENDAPATN LAIN-LAIN YANG SAH</b>						
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Pendapatan Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
23	<b>Jumlah Pendapatan lain-lain yang Sah (20 s/d 22)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
24	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
25	<b>BELANJA</b>						
26	<b>Belanja Operasi</b>						
27	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Belanja Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Belanja Operasi lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
36	<b>Jumlah Belanja Operasi (27 s/d 35)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
37	<b>Belanja Modal</b>						
38	Belanja Aset Tetap	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
40	<b>Jumlah Belanja Modal (38 s/d 39)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
41	<b>Belanja Tak terduga</b>						
42	<b>Jumlah Belanja (36 + 40 + 41)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
43	<b>BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA</b>						
44	Bagi Hasil Pajak ke desa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Bagi Hasil retribusi ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
47	<b>JUMLAH BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
48	<b>DANA CADANGAN</b>						
49	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
51	<b>DANA CADANGAN NETTO (49-50)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
52	<b>SURPLUS/DEFISIT (24-42-47251)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
53	<b>PEMBIAYAAN</b>						
54	<b>Penerimaan</b>						
55	Sisa lebih Perhitungan Anggaran	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Penjualan Investasi Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
58	Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
59	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Pinjaman Dari pemerintah daerah Otonom lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Pinjaman Dari BUMN lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

62	Pinjaman dari BUMD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Pinjaman dari Bank	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Pinjaman dari Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Pinjaman dalam negeri Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
66	<b>Jumlah Penerimaan (55 s/d 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67							
68	<b>Pengeluaran</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Pembayaran pokok pinjaman dari luar negeri	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah daerah otonomi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
72	Pembayaran pokok pinjaman kepada BUMN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Pembayaran pokok pinjaman kepada BUMD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
74	Pembayaran pokok pinjaman kepada dalam negeri lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Pengeluaran penyertaan modal pemerintah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pemberian pinjaman kepada BUMN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pemberian pinjaman kepada BUMD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
79	Pemberian pinjaman kepada Pem. daerah otonom lainnya	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxx	xxx
80	<b>Jumlah Pengeluaran (68s/d78)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO (66-79)</b>						

### c. Laporan Arus Kas

Tujuan standar laporan arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pemerintah melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi pembiayaan dan non anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.



## 1. Penyajian laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan nonanggaran.

## 2. Aktivitas operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:

- a. Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
- b. Penerimaan Hibah
- c. Penerimaan pendapatan Perpajakan
- d. Penerimaan Negara Asli Daerah

Arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk pengeluaran operasional pemerintah diperoleh dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga dan Sewa
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Subsidi
- f. Belanja Jaminan Sosial
- g. Belanja lain-lain

#### h. Belanja Transfer

### 3. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah dimasa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Penjualan Asset Tetap
- b. Penjualan Asset Lainnya

Arus keluar kas dari aktivitas inventasi terdiri dari:

- a. Perolehan Asset tetap
- b. Perolehan Asset lainnya

### 4. Aktivitas pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan defisit/surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas pemerintah dimasa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman
- b. Penjualan Obligasi Pemerintah
- c. Hasil Privatisasi BUMN/BUMD

Arus keluar dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Pembayaran Cicilan Utang
- b. Pembayaran Obligasi Pemerintah
- c. Penyertaan Modal Pemerintah

#### 5. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang.

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menggambarkan arus kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi:

- a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Kiriman Uang Masuk

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi:

- a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Kiriman Uang Keluar

#### 6. Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerimaan manfaat arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Contohnya: hasil kerjasama operasional (KSO).
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.

#### 7. Arus Kas Mata Uang Asing

- a. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang Rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- b. Arus kas yang timbul dari aktivitas pemerintah diluar negeri harus dijabarkan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

#### 8. Pos Luar Biasa

- a. Arus kas dari kejadian-kejadian luar biasa yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan nonanggaran harus diungkapkan secara terpisah sesuai dengan sifat transaksinya.
- b. Arus kas yang timbul dari kejadian luar biasa diungkapkan secara tersendiri agar para pengguna laporan arus kas dapat memahami sifat

dan pengaruh kejadian tersebut terhadap arus kas entitas pemerintah saat ini dimasa yang akan datang.

#### 9. Bunga dan Bagian Laba

- a. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja bunga serta penerimaan pendapatan dari bagian laba BUMN/BUMD harus diungkapkan secara terpisah. Setiap perkiraan yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ketahun.
- b. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar di terima dari pendapatan bunga pada periode yang bersangkutan.
- c. Jumlah pengeluaran belanja bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- d. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba BUMN/BUMD yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba BUMN/BUMD dalam periode akuntansi yang bersangkutan

#### 10. Investasi dalam Entitas Kendalian dan Kemitraan

- a. Pencatatan investasi pada entitas kendalian dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi pemerintah dalam entitas kendalian kemitraan

dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

- b. Entitas harus melaporkan pengeluaran investasi dalam entitas kendalian kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

#### 11. Perolehan dan Pelepasan Entitas Kendalian dan Unit Operasi Lainnya

- a. Arus kas yang berasal perolehan dan pelepasan entitas kendalian dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
- b. Entitas harus mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan entitas kendalian dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
  - 1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan
  - 2) Bagian pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas
  - 3) Jumlah kas dan setara kas pada entitas kendalian atau unit operasi lainnya yang diperoleh dan dilepas
  - 4) Jumlah asset dan utang selain kas dan setara kas pada entitas kendalian atau unit operasi lainnya.
  - 5) Asset dan utang selain kas dan setara kas dari entitas kendalian atau unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai asset atau utang oleh entitas kendalian atau unit operasi.

c. Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Arus Kas.

Pengecualian transaksi nonkas dari laporan arus kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi nonkas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contohnya adalah hibah.

**C. Perbandingan Laporan Keuangan menurut Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Sleman**

1. Persamaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi yang Berlaku

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membandingkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berikut ini adalah perbandingan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah hasil penelitian yang terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Neraca

Secara keseluruhan penyajian terhadap komponen-komponen neraca sudah sesuai dengan komponen-komponen yang berlaku.

Komponen tersebut antara lain:

1. Kas

Catatan terhadap kas telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam rupiah jika ada kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2. Piutang

Pencatatan terhadap piutang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

3. Persediaan

Catatan terhadap persediaan sesuai telah sesuai standar yang berlaku. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai di neraca dengan cara:



- 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4. Belanja dibayar dimuka

Belanja dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayarkan dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode.

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

6. Aktiva Tetap

Asset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai histories, yaitu harga perolehan. Bila Asset Tetap dengan menggunakan nilai histories tidak memungkinkan, maka nilai Asset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Dalam hal penilaian Asset Tetap dengan nilai histories maupun harga perolehan yang diestimasi tidak memungkinkan, maka Asset Tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam neraca dengan nilai Rp. 1,00 untuk tiap satuan barang. Asset Tetap Pemerintah Daerah belum mengenal adanya penyusutan. Asset Tetap akan dihapuskan

apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan.

#### 7. Aktiva Lain-lain

Catatan terhadap aktiva lain-lain telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Asset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal piutang angsuran dan penjualan asset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak. Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan lebih dari satu tahun angsuran.

#### 8. Hutang Lancar

Hutang Lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

#### 9. Ekuitas Dana

Ekuitas dana lancar/umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, dan jumlah surplus atau defisit.

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disebut juga dengan istilah Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Realisasi Anggaran memuat perbandingan antara realisasi APBD dengan APBD yaitu selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi basis kas dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.

Komponen-komponen dari Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Pendapatan/Penerimaan Daerah

Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi, dengan kata lain pengakuan pendapatan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau pengakuan penurunan kewajiban.

Akuntansi pendapatan daerah diakui atas dasar basis kas modifikasian, maka selama tahun anggaran berjalan setiap aliran kas masuk yang melalui kas daerah dicatat pada saat penerimaan kas tersebut selanjutnya pada akhir tahun anggaran pendapatan

diakui dengan basis akrual. Maksudnya, semua pendapatan yang telah mejadi hak pemerintah diakui pada akhir tahun anggaran meskipun kas belum diterima.

Dalam basis akrual, pendapatan daerah diakui pada saat terjadinya transaksi pertukaran atau pada saat derajat kepastian terjadinya peningkatan aktiva atau utang telah dipenuhi, meskipun kas atau aktiva lain belum diterima oleh entitas pemerintah.

Pengukuran pendapatan daerah menggunakan nilai nominal, maksudnya pencatatan pendapatan daerah dengan jumlah kas (setara kas) yang diterima pada saat diperolehnya pendapatan daerah tersebut. Selanjutnya pengukuran pendapatan ini dilakukan dalam rupiah.

## 2. Belanja

Seperti halnya pendapatan daerah, biaya/belanja daerah diakui dengan basis kas modifikasian. Artinya, kas keluar dari kas daerah dicatat pada saat pengeluaran kas tersebut selama tahun anggaran berjalan. Kemudian pada akhir tahun anggaran pengeluaran yang telah menjadi kewajiban Pemerintah namun belum dibayar oleh pemerintah daerah harus dicatat.

Untuk pengukurannya, belanja daerah juga menggunakan basis nilai nominal, sebagaimana pendapatan daerah. Berdasarkan basis ini belanja daerah dicatat sebesar jumlah kas/setara kas yang dikeluarkan pada saat terjadinya belanja tersebut. Demikian dengan

pengeluaran dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan kedalam rupiah.

### 3. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.

### 4. Pembiayaan

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran kas.

Pada akhir periode, pembiayaan diakui berdasarkan selisih pendapatan dan belanja/biaya yang dialokasikan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

### c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas diatur secara umum dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 03, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengalami kesulitan dalam penerapannya. Dimana Laporan Arus Kas mengklasifikasikan aliran kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas nonanggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus

masuk kas dari aktivitas operasi terutama dari aktivitas utama kas pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas ini antara lain:

- 1) Penerimaan Perpajakan
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 3) Hibah
- 4) Penerimaan Dana Perimbangan

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama ditujukan untuk pengeluaran operasi pemerintah. Arus keluar kas dari aktivitas ini antara lain:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang Non-Aset Tetap
- 3) Pembayaran Bunga Utang dan Bunga Obligasi Pemerintah
- 4) Subsidi
- 5) Dana Perimbangan

Arus kas bersih aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang.

Arus masuk dari aktivitas ini antara lain:

- 1) Hasil Penyertaan Modal Pemerintah
- 2) Pengembalian Pinjaman Pemerintah dari BUMN/BUMD
- 3) Penjualan Aset Tetap

Dilain pihak arus keluar kas dari aktivitas ini antara lain:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah
- 2) Pinjaman Pemerintah kepada BUMN/BUMD
- 3) Pembelian Aset Tetap

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran brutto sehubungan dengan defisit/surplus anggaran.

Arus masuk kas aktivitas ini antara lain dari:

- 1) Penerimaan Utang Luar Negeri
- 2) Penjualan Obligasi Pemerintah
- 3) Hasil Privatisasi BUMN/BUMD

Sedangkan arus keluar dari aktivitas ini antara lain:

- 1) Pembayaran Cicilan Utang
- 2) Pembayaran Obligasi Pemerintah

Metode penyusunan laporan arus kas yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah: metode tidak langsung. Metode langsung melaporkan aktivitas operasi selama periode yang dilaporkan. Beda dengan metode tidak langsung adalah, dalam metode tidak langsung melaporkan surplus/defisit yang diperoleh kemudian melaporkan penyesuaian atas surplus/defisit tersebut dengan melaporkan aktivitas operasi.

#### d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bagian terakhir dari komponen laporan keuangan adalah Catatan Atas Laporan Keuangan. bagian bagian khusus yang diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman cukup banyak, karena pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah lebih mendetail dibandingkan ketentuan yang berlaku sebelumnya sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan waktu yang cukup untuk menyesuaikannya.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagian besar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali dalam laporan surplus/defisit. Laporan surplus/defisit Pemerintah Kabupaten Sleman dianggap sebagai bagian pokok dari laporan keuangan karena penyusunan laporan keuangan Kabupaten Sleman berbasis IPSAS.

Beda dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah adalah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah laporan surplus/defisit bukan laporan keuangan pokok. Surplus/defisit dianggap merupakan salah satu bagian dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

Dari hasil perbandingan antara laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah walaupun tidak secara keseluruhan. Tidak dilaksanakan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut sebagian diakibatkan oleh kondisi lingkungan/ geografis Kabupaten Sleman.



Akibat lain yang timbul adalah karena kesulitan dalam penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang tergolong baru. Kesulitan yang paling utama adalah dalam penyajian atas Catatan Atas Laporan Keuangan yang pengungkapannya sangat mendetail dan informatif tidak seperti sebelum adanya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga perubahan hanya dilaksanakan secara bertahap karena hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia dan biaya yang banyak.

## 2. Perbedaan Antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Yang Berlaku

Dari deskripsi data terdahulu maka hanya terdapat sedikit perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Perbedaan yang ada tersebut terletak pada:

- 1) Dalam pengungkapan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah(draft) tidak dimasukan laporan surplus/ defisit sebagai bagian pokok laporan keuangan. Sedangkan dalam pengungkapan laporan keuangan Kabupaten Sleman, dianggap sebagai bagian laporan keuangan. Perbedaan ini disebabkan perbedaan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagian besar penyajiannya mengacu pada IPSAS, di mana menurut IPSAS laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Surplus/Defisit atau Laporan Kinerja
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Perhitungan Anggaran

**D. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah**

Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya disini adalah kualitas sumber daya manusia belum banyak yang memahami penyusunan sistem buku berpasangan(*Double Entry*). Menurut sistem ini, suatu transaksi ekonomi dicatat dua kali. Selama ini mereka lebih memahami sistem buku tunggal(*Single Entry*).

2. Dinas-dinas dalam lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sleman belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Keterbatasan personil tingkat kabupaten untuk konsolidasi.

Ada masalah pada laporan di tingkat Dinas, dimana laporan antar Dinas terpisah satu sama lain. Dengan kata lain orang di tingkat kabupaten terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Dinas.

Laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengandalkan tingkat *skill person* yang memadai. Dalam penelitian ini

ditemukan problem yang serius yaitu: belum banyak sumber daya manusia pada bagian keuangan yang menguasai penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Atas dasar data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dianalisis dengan teknik deskripsi data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, walaupun terdapat sedikit perbedaan antara laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Perbedaan tersebut disebabkan karena laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berbasis IPSAS yang salah satu bagiannya menyajikan laporan Surplus - defisit sebagai laporan pokok/utama dalam penyusunan laporan keuangan. Berbeda dengan yang terdapat dalam Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, laporan surplus defisit bukan merupakan laporan utama. Laporan surplus-defisit hanya salah satu bagian dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan ini tidaklah berarti Pemerintah tidak mampu menerapkan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah melainkan untuk mengikuti mekanisme yang ada dalam IPSAS.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman menemui hambatan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:
  - a. Sumber daya manusia dalam penyusunan tata buku berpasangan(umum)
  - b. Pada tingkat Dinas dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
  - c. Pada tingkat Kabupaten dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian adalah tidak semua data dapat diperoleh dengan lengkap. Daerah tempat penelitian memiliki kebijakan tersendiri untuk yang akan diberikan merupakan rahasia daerah.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Tidak diberikan data yang lengkap mengenai laporan keuangan secara mendetail, peneliti hanya memperoleh gambaran dari hasil wawancara mengenai penyajian laporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini dan sedikit kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Laporan keuangan yang diberikan pemerintah daerah hanya satu periode saja yaitu laporan keuangan tahun 2002. Peneliti tidak dapat mengetahui perkembangan penyusunan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, keterangan yang diperoleh bahwa laporan keuangan yang disusun selama 3

tahun terakhir tetap sama dan telah mengikuti Standar Akuntansi Daerah yang berbasis IPSAS.

### **C. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini masih dapat ditindak lanjuti terutama untuk daerah yang laporan keuangannya berbasis IPSAS, ini dilakukan untuk mengetahui lebih lengkap laporan keuangan yang telah berjalan, termasuk perkembangan laporan keuangan selama beberapa periode berjalan selama 3 sampai dengan 4 tahun terakhir.
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menerapkan standar akuntansi dengan baik sehingga tidak banyak saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Hal yang perlu diperhatikan adalah detail-detail dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan-penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan akan sangat membantu pemakai laporan keuangan, walaupun yang diberikan terbatas pada hal-hal yang pokok saja seperti yang terdapat dalam Neraca. Dengan memberikan detail-detail dalam catatan atas laporan keuangan akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, pernyataan standar akuntansi untuk daerah masih bersifat umum. Standar akuntansi daerah harus disusun dan disesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi di daerah, kelebihan dan keterbatasan dalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah. Tidak semua daerah bisa melaksanakan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerahnya.

4. Perlunya pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah daerah sehingga penyusunan laporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Nur Ahmad.(2002). *Strategi Pengembangan Akuntansi Pusat Dan Daerah*. Makalah Internet.
- Arinta, kustadi(1986). *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alm Bandung.
- Bastian, Indra(2002). *Sistim Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, Revrison d(2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogya: BPFE UGM.
- Bismoko, J dan Supratiknya(2000). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogya: USD.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI(2002a). *Draft Publikasian: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- IAI(2002b). *Draft Publikasian: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- IAI(2002c). *Draft Publikasian: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02: Laporan Realisasi Anggaran*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- IAI(2002d). *Draft Publikasian: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 03: Laporan Arus Kas*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- IAI(2002e). *Pengantar*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Mardiasmo(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogya: Penerbit Andi.
- Maris, Masri(2000). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Republik Indonesia(1999). *Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.



Republik Indonesia(1999). *Undang-Undang No 25 tahun 1999 Tentang Pembagian Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Republik Indonesia(2000). *Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*

Supriatno(1993). *Sistim Administrasi Keuangan Daerah.* Jakarta: Ichtiar.

Wajong(1993). *Administrasi Keuangan Daerah.* Jakarta: Ichtiar.

# LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
NERACA KONSOLIDASIAN  
PER 31 DESEMBER 2002**

URAIAN	31- Des 2002	31- Des 2001
<b>AKTIVA LANCAR</b>		
Kas di Kasda	42.136.434.548.67	18.050.401.543.28
Kas di Pemegang Kas	3.473.078.608.98	1.770.647.785.59
Piutang	7.765.192.000.00	3.642.364.176.28
Persediaan	5.273.671.955.33	4.416.303.322.00
Belanja Dibayar Dimuka	2.030.452.000.00	-
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>60.678.829.113.82</b>	<b>27.879.716.827.15</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Penyertaan Modal Pemda	17.437.658.409.38	16.712.658.409.38
Investasi Permanen Lainnya	9.986.195.505.67	8.126.291.269.25
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>27.423.853.915.05</b>	<b>24.838.949.678.63</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>		
Tanah	22.980.000.492.00	20.237.068.092.00
Jalan dan Bangunan Irigasi	537.737.097.387.00	534.369.051.447.00
Gedung	101.186.672.194.00	99.982.590.994.00
Mesin dan Peralatan	65.007.381.745.50	61.542.267.745.50
Kendaraan	2.212.096.050.00	-
Meubelair dan Kelengkapan	717.139.825.00	-
Aset Tetap Lainnya	160.500.000.00	-
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>730.000.887.693.50</b>	<b>716.130.978.308.50</b>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>		
Piutang Angsuran dari Penjualan Aktiva Tetap	-	-
Built Operating Transfer (BOT)	4.926.000.000.00	4.926.000.000.00
Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>	<b>4.926.000.000.00</b>	<b>4.926.000.000.00</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>823.029.570.722.37</b>	<b>773.775.644.814.28</b>

<b>Uraian</b>	<b>31-Des 2002</b>	<b>31- Des 2001</b>
<b>HUTANG LANCAR</b>		
Hutang kepada Pemerintah Pusat	-	16.826.000.000.00
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	137.744.928.40	137.744.928.40
Hutang Biaya Pinjaman	192.849.117.41	209.258.938.57
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	655.572.222.19	4.845.553.107.15
<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>986.166.268.00</b>	<b>22.018.556.974.12</b>
<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
Pinjaman Dalam Negeri	2.554.362.996.62	3.569.850.007.68
Pinjaman Luar Negeri	-	-
<b>Jumlah Hutang Jangka Panjang</b>	<b>2.554.362.996.62</b>	<b>3.569.850.007.68</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
Ekuitas Dana Lancar	59.692.662.845.82	5.861.159.853.03
Ekuitas Dana DiInvestasikan	759.796.378.611.93	742.326.077.979.47
Ekuitas Dana Dicadangkan	-	-
Ekuitas Dana Donasi	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>819.489.041.457.75</b>	<b>748.187.237.832.50</b>
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>823.029.570.722.37</b>	<b>773.775.644.814.28</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
RINGKASAN PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

No	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN:</b>		
1	<b>BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</b>	<b>15.301.664.101.87</b>	<b>15.301.664.101.87</b>
2	<b>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI</b>	<b>34.846.979.981.95</b>	<b>38.908.192.767.97</b>
	Pajak Daerah	18.399.254.338.95	22.094.977.769.96
	Retribusi Daerah	10.180.264.300.00	10.225.900.071.44
	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	1.979.360.635.00	1.971.054.416.32
	Lain –lain pendapatan	4.288.100.708.00	4.616.260.510.25
3	<b>BAGIAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>288.837.390.109.00</b>	<b>299.961.255.089.58</b>
	Pos bagi hasil pajak	20.500.000.000.00	27.629.184.742.02
	Pos bagi hasil bukan pajak	684.390.109.00	336.372.325.24
	Dana alokasi umum	255.350.000.000.00	255.350.000.000.00
	Dana alokasi khusus	UP	UP
	Pos dana darurat	UP	UP
	Dana perimbangan dari Propinsi	12.303.000.000.00	16.645.698.022.32
4	<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	Pinjaman Luar Negeri	-	-
5	<b>BAGIAN LAIN –LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>	<b>28.379.385.974.00</b>	<b>28.922.587.156.00</b>
	Dana Penyeimbang	23.786.194.000.00	23.716.650.000.00
	Dana Luncuran	500.000.000.00	479.025.700.00
	Penerimaan Penggantian Pembayaran gaji SLB	4.093.191.974.00	4.093.191.974.00
	Bantuan gaji CPNS	-	213.982.606.00
	Bantuan Luar Negeri	-	419.736.876.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>367.365.420.166.82</b>	<b>383.093.699.115.42</b>
	<b>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</b>	-	<b>32.564.356.741.00</b>
	Urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 2001	-	4.519.611.976.00
	Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 2002	-	28.044.744.763.00

Sambungan

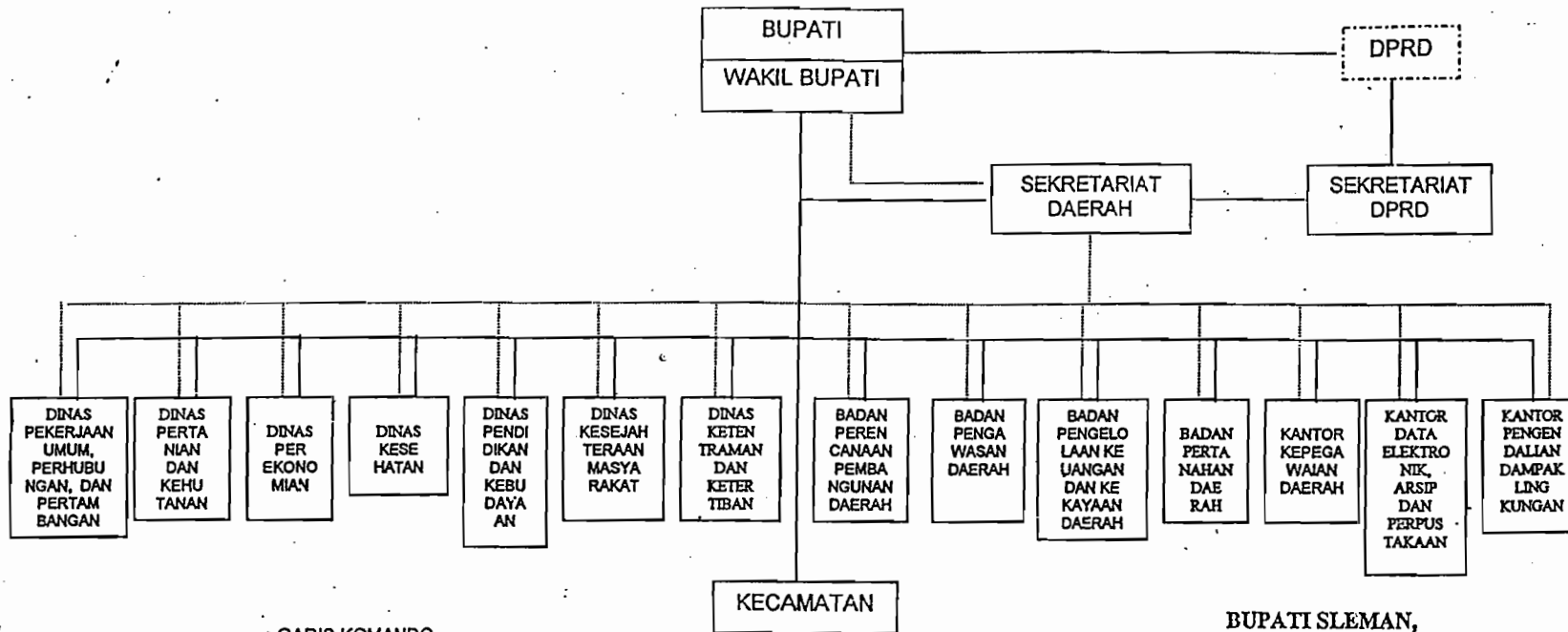
No	URAIAN	Jumlah	
		ANGGARAN	REALISASI
5	6	7	8
II.	<b>BELANJA:</b>		
A.	<b>ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>87.210.210.192.46</b>	<b>81.779.980.739.65</b>
1	Belanja Pegawai	75.948.780.375.49	73.298.579.435.35
2	Belanja Barang	8.334.193.116.97	5.736.152.439.30
3	Belanja Pemeliharaan	2.485.847.700.00	2.371.650.265.00
4	Belanja Perjalanan Dinas	441.389.000.00	373.598.600.00
B	<b>OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM MILIK DAERAH</b>	<b>232.830.812.933.17</b>	<b>215.367.510.590.00</b>
1	Belanja Pegawai	215.154.018.673.17	198.166.819.831.60
2	Belanja Barang	12.612.553.600.00	12.211.957.356.79
3	Belanja Pemeliharaan	4.755.840.660.00	4.680.333.402.00
4	Belanja Perjalanan Dinas	308.400.000.00	308.400.000.00
C	<b>INVESTASI</b>	<b>29.346.803.646.00</b>	<b>24.917.258.739.42</b>
1	Aparatur	15.529.390.208.00	12.211.957.356.79
2	Publik	13.817.413.438.00	4.680.333.402.00
D	<b>TRANSFER</b>	<b>15.643.203.900.00</b>	<b>14.720.307.243.00</b>
E	<b>TAK TERSANGKA</b>	<b>2.334.389.495.19</b>	<b>1.309.000.000.00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>367.365.420.166.82</b>	<b>338.094.057.312.46</b>
	<b>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</b>	-	<b>32.555.599.941.00</b>
	Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001	-	4.519.611.978.00
	Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001	-	28.035.987.936.00

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

NOMOR : 12 Tahun 2000.

TANGGAL : 21 Desember 2000.

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



———— : GARIS KOMANDO

----- : GARIS KOORDINASI

BUPATI SLEMAN,

Cap. ttd.

IBNU SUBIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Sleman  
Telpon/ Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@yogya.wasantara.net.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Nomor : ...070 / 0530.....

Menunjuk Surat Keterangan / ijin dari Bappeda Kabupaten Sleman Nomor : 07.0/VI/855/2003 yang dikeluarkan berdasarkan Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta No. 482/PD I/FE/VI/03 tertanggal 10 Juni 2003 Hal : Ijin Penelitian. dengan ini menyatakan bahwa nama yang tersebut dibawah ini telah benar-benar melaksanakan penelitian dengan Judul : " Penerapan Standart Akutansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Studi Kasus pada Kab. Sleman. DIY) " :

Nama : F. Antonius Tuli Marang  
No. Mahasiswa : 992114121  
Tingkat : S 1  
Akademi/Universitas : USD Yogyakarta  
Alamat Rumah/ Kampus : Jl. Arimbi Gg. Arimbu Pringgodani. Yogyakarta.  
Lokasi penelitian : Kabupaten Sleman  
Waktu pelaksanaan : 23 Juni 2003 sampai dengan 23 September 2003

Demikian Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Sleman

Pada tanggal : 04 November 2003

A.n. Kepala Bappeda Kab. Sleman

Ket. Bidang dan Evaluasi





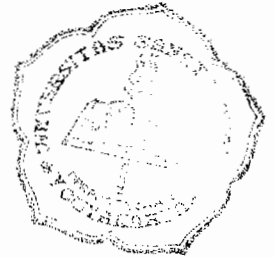


**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

Alamat : Jln. Candi Roro Jonggrang No. 3 Tridadi, Sleman, D.I Yogyakarta  
Telpon ( 0274 ) 868414, Faximile (0274) 868414

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 1604.



Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : F. Antonius Tuli Marang  
No. Mahasiswa : 992114121  
Universitas : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2003 sampai dengan tanggal 23 September 2003.

Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 04 Nopember 2003.



Drs. Kepala Badan  
Sekretaris

Drs. Bambang Priyambodo  
Pembina Gol. IV/a  
NIP. 490024676